

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA KELURAHAN DALAM RANGKA
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHAN BAHU KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO**

JORDAN SAPUTRA SEMPO

ALDEN LALOMA

VERY Y. LONDA

Abstrak

sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi salah satu faktor penghambat maksimalnya program pembangunan berdasarkan masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Rangka Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado

Penelitian ini di desain sebagai suatu penelitian kualitatif dengan maksud menggali atau membangun suatu prosesi atau menjelaskan makna dibalik realita. Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data (informan), adalah Pegawai yang bekerja di Pemerintah Kelurahan Bahu mulai dari Lurah, Sekretaris Kelurahan, Bagian Pemerintahan Lurah, Kepala – Kepala Lingkungan serta Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta semua yang terlibat dalam pengelolaan dana kelurahan. Data yang dikumpul dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif

Hasil penelitian menunjukkan Dalam tahap Perencanaan, belum adanya ketentuan pembagian tentang berapa persen dari penggunaan AAK untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat yang ada. Tahap Pengorganisasian ini dinilai sudah berjalan baik, karena Sudah adanya Pembagian Tanggung Jawab kepada setiap kelembagaan yang telah dibentuk di Kelurahan Bahu, dan kelembagaan tersebut telah berjalan sesuai tupoksinya. Tahap Pelaksanaan, Pihak Kelurahan Bahu memiliki permasalahan utama, yakni Keterbatasan Dana yang cair. Keterbatasan dana yang cair membuat program dan kegiatan khususnya fisik, tidak dapat terealisasi dengan baik. selain itu Keadaan masyarakat yang demotivasi dan kurang berminat untuk melanjutkan keahlian yang dimiliki membuat program tidak berjalan efektif. Tahap terakhir adalah Pengawasan. Dalam dimensi pengawasan ini, mencakup pelaporan dan evaluasi yang dilakukan. Namun dalam aspek Evaluasi, tidak berjalan baik, hal ini dikarenakan tidak adanya evaluasi yang dilakukan usai kegiatan dilaksanakan. Padahal, evaluasi berperan penting guna kegiatan mendatang agar berjalan lebih baik dari sebelumnya.

Kata Kunci : Efektivitas, Pengelolaan Dana, Pemberdayaan Masyarakat

Abstract

Inadequate human resources are one of the factors inhibiting the maximum development program based on these problems. This study aims to determine how Village Fund Management in the Context of Improving Facilities and Infrastructure and Community Empowerment in Shoulder Village, Malalayang District, Manado City

This research is designed as a qualitative study with the intention of exploring or building a procession or explaining the meaning behind reality. In this study, the data sources (informants) are employees who work in the Shoulder Village Government, starting from the Head of the Village, the Secretary of the Village, the Government Division of the Head of the Village, Heads of the Environment and Customary Figures, Community Figures, Religious Figures and all those involved in managing funds. sub-district. The data collected in this study were processed and analyzed qualitatively using an interactive analysis model

The results showed that in the planning stage, there was no provision for the distribution of what percentage of AAK was used for various existing community empowerment programs. This organizing stage is considered to have run well, because there has been a division of responsibilities to every institution that has been formed in the Shoulder Village, and the institution has been running according to its main function. Implementation Stage, Shoulder Village has a main problem, namely limited liquid funds. Limited disbursement of funds has made programs and activities, especially physical, not well realized. In addition, the demotivation of the community and a lack of interest in continuing their existing skills made the program ineffective. The last stage is Supervision. In this dimension of supervision, includes reporting and

evaluation. However, in the evaluation aspect, it did not go well, this is because there was no evaluation that was carried out after the activity was carried out. In fact, evaluation plays an important role in making future activities run better than before.

Keywords: *Effectiveness, Fund Management, Community Empowerment*

PENDAHULUAN

Pembukaan UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa tujuan pembangunan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur, baik material dan spiritual berdasarkan Pancasila UUD 1945. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Diawali dengan Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 dan selanjutnya dilakukan revisi menjadi Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 dan kini direvisi lagi menjadi Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah dijadikan landasan yuridis untuk menggeser fokus politik ketatanegaraan. Pemberian otonomi yang seluas – luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis

globalisasi. Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepada daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.

Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden, konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah diberikan kewenangan melalui asas desentralisasi untuk mengatur rumah tangganya sendiri menurut potensi dan kearifan lokal masing – masing daerah, juga Desa / Kelurahan sebagai unit pemerintahan terendah. Seiring dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka aparat birokrasi pemerintahan di daerah dapat mengelola dan penyelenggaraan pelayanan publik dengan lebih baik sesuai dengan tujuan desentralisasi yaitu sebagai perwujudan

demokrasi sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh pemerintah pusat.

Pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat semakin mengemuka dan sentralisasi semakin berkurang dengan demikian proses pertumbuhan demokrasi tingkat lokal kurang begitu baik. hal ini telah membuka ruang untuk pemberdayaan pemerintah daerah agar dapat mengembangkan daerah yang dipimpinnya. Didalam berbagai bidang kehidupan manusia, pemerintah memainkan peran yang sangat penting. Salah satunya yakni mengelola anggaran mereka sendiri.

Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara. Sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Dalam arti masyarakat harus ikut berpartisipasi dan diberi kepercayaan dan kewenangan yang cukup dalam mengurus rumah tangga kelurahannya, sehingga bisa mandiri dan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.

Keberadaan kelurahan secara yuridis formal diakui didalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Berdasarkan ketentuan ini di Kelurahan diberi pengertian sebagai wilayah kerja Lurah sebagai perangkat desa Kabupaten/Kota dalam Wilayah kerja kecamatan. Pemahaman kelurahan diatas menempatkan Kelurahan sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur sendiri warga atau kepentingannya.

Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah di prioritaskan untuk melindungi dan

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Hal ini tentu sangat berkaitan dengan APBD yang merupakan salah satu sumber keuangan kelurahan.

Kelurahan juga merupakan satuan kecil pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat karena berada di wilayah masyarakat itu tinggal. Oleh karena itu, kelurahan mempunyai hak sendiri untuk mengelola dan mengatur berbagai anggaran keuangan kelurahan guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, wujud dari program otonomi pengelolaan anggaran terdapat dalam bentuk penguatan manajemen kelurahan. Masing – masing kelurahan ini diberi wewenang / otonomi pengelolaan anggaran sendiri, ini merupakan implementasi dari konsep otonomi daerah.

Proses otonomi pengelolaan anggaran Kelurahan dimulai dari Rencana Kerja yang dibuat oleh Kasi (Kepala Seksi) yang ada di Kelurahan dan isinya mencakup Musrembang atau Musyawarah Rencana Pembangunan yang merupakan wadah bagi aspirasi dari lapisan elemen masyarakat seperti RT, RW dan Tokoh Masyarakat serta mitra kerja yang berada dalam kawasan kelurahan.

Rencana kerja kelurahan ini dikemudian dilanjutkan ke tingkat kecamatan dari tingkat kecamatan ini kemudian digunakan sebagai bahan untuk menyusun S RKA-SKPD (Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah). Penyusunan RKA-SKPD ini dilakukan di BAPEDA (Badan Perencanaan Daerah) Kota Manado dan dalam Penyusunan RKA-SKPD ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing – masing kelurahan tersebut. Setelah disetujui dan ketok palu, maka disebut DPA atau Dana Pengguna Anggaran yang dapat diambil di Badan Keuangan Daerah atau DPPKD Kota.

Alokasi dana kelurahan menurut UU No, 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa 5% dana yang bersumber dari APBD

Kabupaten/Kota ini diberikan untuk Kelurahan yang diperuntukkan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat.

Rencana pembangunan sarana dan prasarana dibuat berdasarkan permintaan dalam musyawarah saat musrembangkel dengan warga yang kebanyakan menginginkan pembangunan fisik agar lebih ditingkatkan. Sehingga, pada akhirnya pembangunan fisik agar lebih diprioritaskan dari pada kegiatan non fisik yang sebenarnya jika berjalan baik akan memberikan manfaat yang besar bagi warga karena dapat membuat masyarakat mandiri dan mampu meningkatkan ekonomi keluarga.

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi – kreasi, mengontrol lingkungan menentukan proses politik diranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Sunyoto, 2004 : 154).

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan, sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu – individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial (Suharto, 2014:58).

Pengelolaan anggaran kelurahan Bahu sangat penting kaitannya dengan jalannya berbagai program kegiatan kelurahan yang telah diwadahi melalui musrembang

kelurahan, namun dalam peraturan perundang – undangan, maupun peraturan Walikota Manado belum tercantum ketentuan jelas berapa pembagian yang diharuskan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi terhitung pada tahun anggaran 2018 Kelurahan Bahu menetapkan yakni 40% untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dan 40% untuk pemberdayaan masyarakat dan sisanya untuk biaya operasional termasuk honorer dalam rangka pelaksanaan anggaran alokasi anggaran kelurahan, lurah berkedudukan sebagai kuasa anggaran hal ini sesuai dengan Pasal 30 ayat 3 peraturan pemerintah No. 17 Tahun 2018 bagian kedua tentang pedoman kelurahan. Alokasi anggaran kelurahan untuk urusan pembangunan infrastruktur kemudian di distribusikan keseluruh lingkungan kelurahan bahu sesuai dengan skala prioritas pembangunan yang telah disepakati pada musrembang kelurahan bahu kemudian menjadi tugas kepala – kepala lingkungan merealisasikan rencana pembangunan menggunakan dana yang telah dikucurkan.

Berpatokan dari hasil – hasil observasi awal yang telah peneliti lakukan di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang didapati permasalahan yang muncul mengenai pengelolaan anggaran kelurahan khususnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang didistribusikan ke tiap lingkungan setempat.

Pertama sesuai dengan yang telah penulis uraikan sebelumnya dana alokasi kelurahan tidak tersebar secara merata untuk masing – masing lingkungan di Kelurahan Bahu. Terlebih aparat kelurahan tidak mengakui adanya lingkungan yang tidak mendapatkan kucuran dana, mengisyaratkan transportasi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi anggaran di kelurahan belum Nampak dilaksanakan oleh aparat Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Manado.

Kedua pengelolaan anggaran kelurahan yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban tidak dilakukan secara optimal baik ditingkat Kelurahan Bahu maupun ditingkat eksekutor program kegiatan yakni disetiap lingkungan setempat.

Ketiga menurut hemat penulis sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi salah satu faktor penghambat maksimalnya program pembangunan di Kelurahan Bahu yang bersumber dari dana alokasi anggaran kelurahan terutama pada tingkat eksekutor yakni kepala – kepala lingkungan. wawasan pejabat lingkungan mengenai tahapan dan tata cara pengelolaan keuangan daerah yang tidak dimengerti dengan baik ditenggarai menjadi penyebab ketidak optimalan pemanfaatan alokasi anggaran Kelurahan Bahu.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka fokus penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan mengenai aspek – aspek dalam pengelolaan alokasi anggaran kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang dilimpahkan pada Kelurahan setempat sebagai ujung tombak perwakilan pemerintah untuk mengelola dana ditingkat kelurahan. Sehingga seluruh lapisan masyarakat ikut merasakan peningkatan kualitas kehidupan mereka. Maka berlatar dari permasalahan tersebut peneliti tertarik memilih judul “Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Rangka Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado.”

TINJAUAN PUSTAKA

Handyaningrat, 1992) diartikan sebagai pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah di tentukan sebelumnya. Ensiklopedia Administrasi (The Liang Cie Dkk, 1990) mengartikan efektivitas sebagai sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya), dan dapat membawa hasil, berhasil guna (tindakan) serta dapat pula berarti mulai berlaku (tentang undang-undang/peraturan).

Bila di telusuri efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya: (1) ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya kesannya) seperti : manjur, mujarab; mempan; dan (2) Penggunaan metode / cara, sarana /alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal).

Menurut Gibson dkk (1996) konsep efektivitas dalam organisasi dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu : efektivitas individu, efektivitas kelompok, dan efektivitas organisasi. (1) pandangan dari segi efektivitas individu menekankan pada hasil kerja anggota tertentu dari organisasi. Tugas yang harus dilaksanakan biasanya ditetapkan sebagai bagian dari pekerjaan atau posisi dalam organisasi. Efektivitas individu di nilai secara rutin lewat proses evaluasi hasil kerja yang merupakan dasar bagi promosi, kenaikan gaji, dan imbalan lainnya. (2) pandangan dari segi efektivitas kelompok melihat efektivitas kelompok adalah jumlah kontribusi dari semua anggota kelompok. (3) Pandangan dari segi efektivitas organisasi melihat efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan efektivitas kelompok. Dari pendapat ini jelas bahwa ada tiga tingkatan analisis tentang efektivitas yaitu individu, kelompok, dan organisasi.

Konsep Pengelolaan

Pengelolaan dapat pula berarti Manajemen, karena pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, yang merupakan penambahan kata pungut ke Bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu diartikan menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi – fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek – aspek antar lain *planning, organizing, actuating dan controlling*.

Secara etimologis kata manajemen berasal dari Bahasa Prancis kuno *management*, yang berarti seni melaksanakan

dan mengatur. Sedangkan secara terminologys para pakar mendefinisikan manajemen secara beragam, diantaranya : Follet oleh Wijayanti (2008 : 1) mengartikan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha – usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya – sumber daya manusia organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan Stoner oleh Wijayanti (2008:1).

Pemberdayaan Masyarakat

Secara umum pemberdayaan dalam pembangunan meliputi proses pemberian kekuasaan untuk meningkatkan posisi sosial, ekonomi, budaya dan politik dari masyarakat yang bersifat lokal, sehingga masyarakat mampu memainkan peranan yang signifikan dalam pembangunan. Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan.

Pemberdayaan dalam Bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari empowerment dalam Bahasa Inggris. Pemberdayaan sebagai terjemahan dari empowerment menurut Merriam Webster dalam Oxford English Dictionary mengandung dua pengertian yakni “To give ability or enable to”. Artinya memberi kecakapan / kemampuan atau memungkinkan. Dan “To give power of authority to”, artinya “memberi kekuasaan”. Hakikat dan konseptualisasi empowerment berpusat pada manusia dan kemanusiaan, dengan kata lain manusia dan kemanusiaan sebagai tolak ukur normative, struktural dan substansial.

Pemberdayaan sering merujuk pada kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa

kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan control. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian diatas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi.

Secara konseptual, pemberdayaan berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentah dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, menjangkau sumber – sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang – barang dan jasa yang mereka perlukan, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2010 : 58).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini di desain sebagai suatu penelitian kualitatif. Bogman dan Taylor (dalam Moleong, 2006) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati. Denzin dan Lincoln (dalam Moleong, 2006) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Moleong (2006) dengan mendasari pada definisi atau pandangan para ahli menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang di alami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lain - lain) secara holistic, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Bungin (2010) mengatakan, penelitian kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu prosesi atau menjelaskan makna dibalik realita. Dalam penelitian kualitatif penelitian berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung di lapangan.

Menurut Nasution (2001), penelitian kualitatif termasuk kategori penelitian non -

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari para informan yang ditetapkan sedangkan data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain (Collin Finn.1997)

Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data (informan), adalah Pegawai yang bekerja di Pemerintah Kelurahan Bahu mulai dari Lurah, Sekretaris Kelurahan, Bagian Pemerintahan Lurah, Kepala – Kepala Lingkungan serta Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta semua yang terlibat dalam pengelolaan dana kelurahan. Rincian responden dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Lurah Bahu 1 orang
2. Sekretaris dan Perangkat Kelurahan lainnya 3 orang
3. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat 3 orang

Salah satu sifat dari penelitian kualitatif atau naturalistic ialah tidak terlalu meningkatkan jumlah atau banyaknya informan atau stempel responden, tetapi yang lebih penting ialah content, relevansi, sumber yang benar – benar dapat memberikan informasi. Oleh karena itu, teknik yang digunakan untuk menentukan sumber data informan ialah teknik proporsional sampling atau pengambilan sampel dengan tujuan tertentu (Arikunto. 2002), kegiatan penggalian informasi bergulir menggelinding atau berkembang mengikuti prinsip bola salju (snowball sampling) sehingga fariasi.

Kedalaman dan keterincian data atau informasi dapat di peroleh secara maksimal. Pencarian data/informasi di hentikan pada saat pencapaian kejenuhan (redumdancy) karena data/informasi yang diberikan sudah sama atau tidak berubah.

Tennik Pengumpulan Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan 67mpiric67er utama. Atas pertimbangan inilah maka dalam pengumpulan data pada penelitian ini digunakan teknik sebagai beriku (Egon G. Guba, 1985 dalam Nasuition. 2001).

1. Wawancara (interview). Wawancara dilakukan terhadap para informan yang telah di tentukan untuk mendapatkan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang berbagai hal yang berhubungan dengan masalah yang di teliti. Dalam wawancara ini digunakan pedoman wawancara sebagai panduan wawancara agar dapat lebih terfokus dan konsistensinya hasil pendataan.
2. Studi Empiric. Studi Empiric ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder pendukung dan data primer hasil wawancara.
3. Observasi. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, dengan maksud memperoleh gambaran empiric tentang objek penelitian. Teknik observasi ini dapat mempermudah dalam menielaskan keterkaitan dari fenomena yang diamati

Metode Analisis Data

Data yang dikumpul dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif. Menurut Miles dan Huberman (dalam Rohidi dan Mulyarto. 1992). Analisis model interaktif memungkinkan seorang

peneliti melakukan kegiatan analisis secara longgar tanpa

harus melalui proses yang kukuh dari pengumpulan data dilanjutkan reduksi data, penyajian data, dan berakhir pada penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun

langkah-langkah analisis data yang dimaksudkan yaitu terdiri dari: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi Data. Reduksi data ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Kegiatan reduksi data ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dan dilanjutkan setelah data terkumpul dengan membuat ringkasan, menelusuri tema dan menggolongkannya kedalam suatu pola yang lebih jelas (Trompenaar Fons, 1993, dalam Rohidi 2002).
2. Penyajian Data. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah selanjutnya dalam proses analisis data adalah melakukan kegiatan interpretasi hasil penelitian. Interpretasi hasil penelitian merupakan penafsiran terhadap hasil akhir dalam melakukan pengujian data dengan teori dan konsep para ahli sehingga bisa mengembangkan teori atau bahkan menemukan teori baru serta mendeskripsikan dari hasil data dan fakta di lapangan.

Dalam hal ini, peneliti akan menghubungkan temuan hasil penelitian dilapangan dengan dasar yang telah ditetapkan sejak awal mengenai Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bahu

Kecamatan Malalayang Kota Manado dengan menggunakan teori Manajemen yang diperkenalkan Terry (2010:9) dengan dimensi yang disingkat POAC yakni, Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Penggerakan/Pelaksanaan), dan Controlling (Pengawasan).

Namun, dalam pelaksanaannya banyak masalah yang ditemukan peneliti yang kaitannya dengan Bagaimana Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana di Kelurahan Bahu serta Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) untuk pemberdayaan masyarakat Kelurahan Bahu yang diperoleh berdasarkan pengamatan peneliti dan hasil wawancara langsung peneliti dengan informan penelitian di lapangan.

1. Planning (Perencanaan)

Perencanaan adalah sejumlah keputusan mengenai keinginan dan berisi pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Hasibuan, 2007:93). Pertama, dalam dimensi perencanaan ini, pihak Kelurahan Bahu khususnya kasi Pemberdayaan Masyarakat dalam menyusun dan membuat rencana kerjanya sebenarnya sudah cukup baik. hal ini terlihat dari rencana kerja yang telah dibuat dengan baik oleh kasi pm Kelurahan Bahu dengan meneruskan program yang sebelumnya telah berjalan dengan baik lalu dilanjutkan di tahun berikutnya, selain itu, dalam membuat rencana kegiatan, tidak lupa kasi PM memasukan kegiatan yang merupakan keinginan atau usulan warga mengenai pemberdayaan masyarakat.

Namun, dikarenakan belum adanya pembagian yang jelas dari Peraturan Walikota tahun 2018 tentang pembagian berapa persen untuk pemberdayaan masyarakat bagian fisik dan non-fisik, maka dalam membuat rencana kerja ini, Pembuatan rencana Penggunaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat masih

tergantung dari seberapa kreatif dan inovatif individunya, dalam hal ini adalah pegawainya. Selain itu, mengingat perencanaan yang dibuat oleh Kasi PM ini merupakan usulan dan keinginan dari masyarakat baik saat musyawarah formal maupun usulan langsung yang diajukan, meskipun kebanyakan usulan adalah pembangunan fisik yaitu perbaikan sarana dan prasarana maka, usulan untuk kegiatan pelatihan keterampilan dan pembinaan, yang pada akhirnya keterampilan yang telah didapat ini tidak diterapkan dan diteruskan oleh masyarakat, sehingga banyak program tidak berjalan secara berkelanjutan.

2. Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan persatuan berbagai macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menyediakan alat yang diperlukan, menetapkan wewenang secara relative didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut. (Hasibuan, 2007:118).

Pihak Pemerintah Kelurahan Bahu khususnya kasi pemberdayaan masyarakat dalam pengorganisasian sudah cukup baik. hal ini dapat terlihat dari pembagian tanggung jawab kepada setiap kelembagaan yang telah dibentuk di Kelurahan Bahu. Kelembagaan itu ada LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang lebih condong hanya ke Pemberdayaan Masyarakat kegiatan Fisik, seperti pembuatan Drainase, pengaspalan dan Pembuatan jalan setapak. Selain itu untuk pemberdayaan masyarakat non-Fisik, ada PKK Kelurahan yang mencakup beberapa kelompok yang diberdayakan, seperti Pokja (kelompok kerja) dan Kelompok Wanita Tani, lalu selain PKK juga ada Karang Taruna yang berjumlah 35 orang. Masing-masing dari kelembagaan tersebut bertanggung jawab dan berjalan sesuai dengan tupoksi yang ada.

3. Actuating (Pelaksanaan)

Actuating menurut Purwanto (2006: 58) Penggerakan adalah membuat semua anggota organisasi mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk

mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Actuating merupakan bagian yang sangat penting dalam proses manajemen, karena mencakup directing (pengarahan), dan coordinating (bekerjasama).

Dalam dimensi Actuating, pihak Pemerintah Kelurahan Bahu dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan alokasi anggaran Kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat Kelurahan masih tersandung dengan masalah keterlibatan masyarakat yang tergolong sangat minim partisipasinya dalam hal keterlibatan mereka dalam kegiatan fisik maupun non fisik. Contohnya seperti awalnya masyarakat semangat bahkan terkadang meminta untuk diadakannya sosialisasi atau pelatihan keterampilan, tapi giliran sudah dilaksanakan, masyarakat malah tidak memperhatikan keterampilan dan ilmu yang mereka dapat itu dengan melakukan pekerjaan atau terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat.

Lebih lanjut, beberapa program pelatihan keterampilan dan pembinaan yang rutin dilaksanakan tiap tahun yang diperuntukkan untuk masyarakat yang memang menjadi kelompok sasaran sayangnya memang berjalan kurang baik, hal ini dapat terlihat dari sikap demotivasi masyarakat yang tidak berminat untuk melanjutkan keterampilan yang dimiliki menjadi salah satu masalah yang mengakibatkan program peningkatan taraf hidup masyarakat tidak berjalan baik.

Hal tersebut disebabkan karena masyarakat yang juga menginginkan tidak hanya pelatihan keterampilan, namun masyarakat juga menginginkan penyokongan berupa dana dan distribusi produk dari Pihak Kelurahan. Namun, penyokongan dan distribusi ini tidak semua Kelurahan Bahu dapat bantu, karena kurangnya dana dan adanya skala prioritas lain, salah satu contohnya seperti Pembuatan Talud dan Jalan Setapak yang menghubungkan setiap lingkungan yang ada di Kelurahan Bahu.

Selain itu, dalam pelaksanaan Pengelolaan Alokasi anggaran untuk pemberdayaan masyarakat Kelurahan ini juga didapat dalam temuan lain peneliti di lapangan, yakni keterbatasan dana yang cair. Berdasarkan wawancara dengan informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa keterbatasan dana menjadi penyebab utama rencana-rencana kerja yang telah dibuat kasi PM dan di rencanakan oleh masyarakat tidak dapat terealisasi dengan baik. hal ini dikarenakan dana yang cair tidak sesuai dengan permohonan anggaran.

Namun, selebihnya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang didanai oleh AAK ini berjalan baik, seperti Program Raskin, program LPM yang lebih kearah pembangunan fisik tersebut seperti kue kering dan snack dapat dijual di beberapa koperasi perusahaan yang bermitra dengan Kelurahan Bahu karena berada di kawasannya.

4. Controlling (Pengawasan)

Controlling atau pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Controlling sendiri terdiri dari Pengawasan itu sendiri, Pelaporan, dan Evaluasi yang dilakukan setelah selesai kegiatan. Dalam dimensi ini, pihak Kelurahan Bahu dalam kegiatan pengawasan pengelolaan alokasi anggaran Kelurahan (AAK) untuk pemberdayaan masyarakat dinilai cukup baik, begitu pula dengan Pelaporan kegiatan atau LPJ kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dibuat oleh kasi PM yang sudah berjalan cukup baik, lain halnya dengan Evaluasi yang seharusnya dilakukan, di Kelurahan Bahu Tidak adanya Evaluasi yang dilakukan setelah selesainya kegiatan berlangsung. Sedangkan Evaluasi merupakan aspek yang cukup penting guna perbaikan dan Improvement dalam kegiatan mendatang.

Bentuk keterlibatan masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) untuk pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

Perencanaan

Dalam dimensi perencanaan, kasi PM Kelurahan Bahu meneruskan program yang sebelumnya telah berjalan dengan baik lalu dilanjutkan tahun berikutnya, selain itu, dalam membuat rencana kegiatan, tidak lupa kasi PM memasukan kegiatan yang merupakan keinginan atau usulan warga mengenai pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilakukan mengingat karena belum adanya ketentuan aturan yang membahas pembagian fisik dan nonfisik. Selain itu, mengingat perencanaan yang dibuat oleh Kasi PM ini merupakan usulan dan keinginan dari masyarakat baik saat musyawarah formal maupun usulan langsung yang diajukan, meskipun kebanyakan usulan adalah pembangunan fisik daripada non fisik. Adapun usulan untuk kegiatan pelatihan keterampilan dan pembinaan, yang pada akhirnya keterampilan yang telah didapat ini tidak diterapkan dan diteruskan oleh masyarakat, sehingga banyak program tidak berjalan secara berkelanjutan atau tidak efektif.

Pengorganisasian

Dalam dimensi pengorganisasian, di Kelurahan Bahu sudah adanya pembagian tanggung jawab kepada setiap kelembagaan yang telah dibentuk di Kelurahan Bahu. Dan kelembagaan tersebut berjalan sesuai tupoksinya. Kelembagaan pemberdayaan Masyarakat ini adalah LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang mana kedua lembaga ini lebih kearah pembangunan Fisik. Lalu ada PKK Kelurahan yang menaungi POKJA (Kelompok Kerja), dan KWT (kelompok wanita tani). serta terakhir ada Karang taruna, yang lebih memberdayakan Pemuda Kelurahan Bahu dalam segala bidang. Baik social, ekonomi, agama dan industry.

Pelaksanaan/Penggerak

Demotivasi dan minat masyarakat yang kurang terhadap program yang dibuat oleh

Kasi PM Kelurahan Bahu serta adanya keterbatasan dana yang membuat beberapa program dan kegiatan yang telah diusulkan warga menjadi tidak teralisasi. Namun selebihnya, pengelolaan AAK untuk Pemberdayaan masyarakat kelurahan Bahu sudah sesuai dengan kegiatan yang ada dilapangan. Terutama pada Kegiatan dan program yang bersifat pembangunan fisik, seperti pembangunan jembatan, pembuatan jalan konblok, dan pembuatan WC warga. Program-program lain seperti Pembagian benih tanaman seperti cabe 123 dan tomat pada KWT (Kelompok wanita Tani) pun berjalan baik karena berkelanjutan hingga saat ini.

Pengawasan

Dalam dimensi pengawasan ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Kelurahan Bahu dalam aspek pelaporan telah berjalan baik, namun tidak dengan aspek Evaluasi, karena tidak adanya evaluasi yang dilakukan usai kegiatan dilaksanakan. Padahal, evaluasi berperan penting guna kegiatan mendatang agar berjalan lebih baik dari sebelumnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian, Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana Kelurahan Malalayang Kecamatan Malalayang Kota Manado dinilai Belum Maksimal, hal ini dikarenakan masih ditemukannya masalah-masalah dalam proses Perencanaan, pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan. Peneliti juga akan mengungkapkan bagaimana bentuk Keterlibatan masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana Kelurahan Malalayang Kecamatan Malalayang Kota Manado. Maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam tahap Perencanaan, belum adanya ketentuan pembagian tentang berapa persen dari penggunaan AAK untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat yang ada. Mengingat, di Kota Manado tahun 2018 belum diterapkan Perda atau Perwal yang membahas pembagian dana tersebut membuat tugas – tugas perencanaan berjalan kurang efektif, sehingga Kasi PM yang membuat sendiri program dan kegiatan yang akan dilakukan.
2. Dari semua tahap Fungsi manajemen yang ada, hasil penelitian dalam Tahap Pengorganisasian ini dinilai sudah berjalan baik, karena Sudah adanya Pembagian Tanggung Jawab kepada setiap kelembagaan yang telah dibentuk di Kelurahan Bahu, dan kelembagaan tersebut telah berjalan sesuai tupoksinya.
3. Tahap Pelaksanaan, Pihak Kelurahan Bahu memiliki permasalahan utama, yakni Keterbatasan Dana yang cair. Keterbatasan dana yang cair membuat program dan kegiatan khususnya fisik, tidak dapat terealisasi dengan baik. selain itu Keadaan masyarakat yang demotivasi dan kurang berminat untuk melanjutkan keahlian yang dimiliki membuat program tidak berjalan efektif.
4. Tahap terakhir adalah Pengawasan. Dalam dimensi pengawasan ini, mencakup pelaporan dan evaluasi yang dilakukan. Namun dalam aspek Evaluasi, tidak berjalan baik, hal ini dikarenakan tidak adanya evaluasi yang dilakukan usai kegiatan dilaksanakan. Padahal, evaluasi berperan penting guna kegiatan mendatang agar berjalan lebih baik dari sebelumnya.

Saran

Pengelolaan atau Manajemen Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) untuk pemberdayaan masyarakat dengan teori fungsi manajemen POAC menjadi rujukan peneliti dalam memberikan sumbangsih pemikiran

dalam bentuk saran yang dapat dipertimbangkan oleh pihak Kelurahan Bahu, khususnya Kasi Pemberdayaan Masyarakat pada masa-masa mendatang. Adapun saran-saran tersebut antara lain :

1. Perencanaan (planning) Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pihak Pemerintah Kelurahan Bahu guna menyempurnakan perencanaan yang telah ada saat ini, yakni :
Dalam rangka membuat Perencanaan, Hendaknya dibarengi dengan penjelasan dan rincian yang jelas tentang seperti apa program yang akan diadakan dan manfaat langsung apa saja yang nantinya akan masyarakat peroleh.
Dalam pembuatan perencanaan, sebaiknya juga dilihat terlebih dahulu ketersediaan Dana tahun sebelumnya, agar keinginan masyarakat sesuai dengan dana yang ada nantinya.
2. Pengorganisasian (Organizing) Menjaga dan meningkatkan komunikasi antara pihak Pemerintah Kelurahan Bahu khususnya Kasi PM dengan kelembagaan pemberdayaan masyarakat yang ada, misalnya dengan diadakannya silaturahmi sekaligus forum sharing antara pihak Kelurahan dengan kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat. Selain itu, bisa juga dengan adanya wisata bersama guna mempererat dan menjaga komunikasi yang baik.
3. Pelaksanaan/Penggerakan (Actuating) Diharapkan kepada pihak Kelurahan untuk selalu melakukan forecasting atau perkiraan pada saat Perencanaan, sehingga dalam pelaksanaan, keinginan, keikutsertaan dan manfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya seperti pada saat pembuatan rencana tentang program yang akan dibuat dalam Pemberdayaan masyarakat, hendaknya membuat perkiraan juga tentang

bagaimana respon masyarakat, minat masyarakat serta manfaat untuk masyarakat tersebut. Diharapkan juga adanya sosialisasi dari Kepala Kelurahan atau dalam hal ini adalah Lurah Bahu guna memberikan dukungan dan pemahaman yang baik kepada masyarakat terkait berbagai kegiatan dan program pemberdayaan fisik dan non-fisik yang berjalan.

4. Pengawasan (Controlling) Diharapkan adanya Evaluasi yang dilakukan Kasi PM beserta Pihak terkait seperti Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat usai berakhirnya Kegiatan, agar ke depannya, kegiatan dapat berjalan sesuai harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, M . (2013). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung : Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Djohani, R. (2003). *Partisipasi, Pemberdayaan, dan Demokrasi Komunitas*. Bandung: Studio Driya Media
- Gibson, L. J. 2002. *Organization*, Terjemahan. Jakarta Erlangga
- Handoko, T. Hani. (1995). *Manajemen personalia dan sumber daya manusia*. Yogyakarta : BPFE
- Hasibuan, M. S.P. (2003). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hikmat, Harry. (2001). *Strategi Pembrdayaan Masyarakat*. Bandung : Humaniora Utama Press
- Moleong, L. J. (2009) *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

- Siagian, Sondang P. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Siagian, Sondang P. (2005). *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara
- Soetrisno. (2001). *Pemberdayaan dan Upaya Pembebasan Kemiskinan*. Yogyakarta : Philosophy Press
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung : CV. Alfabeta
- Steers, Richard. 1984. *Efektivitas Organisasi*. Erlangga Jakarta.
- Suharto, E. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- _____. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sumaryadi, I Nyoman. (2005). *Perencanaan pembangunan daerah otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Citra Utama
- Sumodinigrat, Gunawan (2007). *Pemberdayaan Sosial*. Jakarta : Kompas Media Nusantara
- Terry, George dan Leslie W. Rue. (2010). *Dasar-dasar manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara
- Terry, George. (2010). *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara
- Wijayanti, Irine Diana Sari. (2008). *Manajemen*, Yogyakarta : Mitra Cendekia Press
- Peraturan Perundang-undangan :**
- Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan